

Perang Aceh 1873-1912: Dari Pengkhianatan Perjanjian Sumatera hingga Lahirnya Semangat Perang Sabil

Bahri¹, Muh. Akbar², Fadli³

¹Universitas Negeri Makassar

²Universitas Negeri Manado

³Universitas Sebelas Maret

E-mail: bahri@unm.ac.id¹, muhakbar@unima.ac.id², fadliblk60@gmail.com³

Article History:

Received: 10 Oktober 2025

Revised: 27 Oktober 2025

Accepted: 31 Oktober 2025

Keywords: *Perjanjian; Semangat Perang Sabil; Masyarakat Aceh*

Abstract: *Perang Aceh (1873–1912) merupakan salah satu konflik kolonial terpanjang dalam sejarah Indonesia yang berakar pada pengkhianatan Belanda terhadap Perjanjian Sumatera 1871. Pelanggaran perjanjian tersebut memicu reaksi keras dari Kesultanan Aceh yang menafsirkan tindakan Belanda sebagai deklarasi perang terbuka. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji latar belakang politik dan keagamaan perang, peran ulama dalam mobilisasi rakyat melalui ideologi perang sabil, serta dampaknya terhadap kehidupan sosial-ekonomi masyarakat Aceh. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan empat tahapan: heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Sumber data diperoleh dari literatur primer dan sekunder berupa buku, karya ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perang Aceh bukan semata-mata perlawanan terhadap kolonialisme Belanda, melainkan juga manifestasi dari keyakinan agama Islam yang telah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat Aceh. Ulama memainkan peran sentral dalam menyatukan rakyat melalui dakwah jihad, karya sastra religius, dan seruan. Hikayat Perang Sabil menjadi instrumen ideologis yang menumbuhkan semangat kolektif untuk mempertahankan tanah air dan iman. Secara sosial-ekonomi, perang berkepanjangan ini menimbulkan runtuhnya perekonomian, menurunnya kesejahteraan, serta disintegrasi struktur pemerintahan tradisional. Lahirnya keteguhan moral dan spiritual yang menjadikan Islam sebagai kekuatan pemersatu. Dengan demikian, Perang Aceh dapat dimaknai sebagai bentuk jihad sosial dan politik masyarakat Aceh dalam mempertahankan martabat, kedaulatan.*

PENDAHULUAN

Provinsi Aceh menempati daerah paling Barat di Pulau Sumatra yang memiliki posisi paling paling strategis diantara daerah yang lainnya. Aceh menjadi akses lalu lintas perniagaan

dan kebudayaan (Purwanto, 2021) . Sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya Wilayah Aceh salah satu kerajaan yang sangat mendominasi yang kemudian dibuktikan dengan kekuatan ekspedisi pelayaran di selat Malaka. Armada Portugis banyak dihancurkan oleh kerajaan Aceh, pada saat penghancuran armada tersebut dapat digambarkan dengan kabut yang sangat pekat yang menutupi selat Malaka (Siahaan, S., Hendra, A., & Midhio, 2021).

Pada tahun 1857 ditandatanganinya sebuah perjanjian internasional antara pihak Belanda dan negara yang berdaulat di Nusantara (Kurnia, R. R., Saputro, G. E., & Prakoso, 2023). Perjanjian tersebut dikenal dengan Tractat London. Tractat tersebut berisi pengakuan atas kedaulatan Negara Aceh oleh Pihak Belanda dan perjanjian saling mengakui kedaulatan dan menghormati kedaulatan masing-masing. Setelah 26 tahun tractat london ditandatangani pada tahun 1873 Belanda mengirim surat kepada kesultanan Aceh yang menyatakan perang kepada Aceh. Selain itu, secara sepihak Belanda membuat Tractat Soematera untuk mengesahkan agresi mereka ke Aceh di saat kondisi melemah. Hal tersebut dapat diliha sebelum agresi Belanda ke Aceh 1873 (Siahaan, S., Hendra, A., & Midhio, 2021). Perang Aceh mungkin menjadi salah satu perang terlama yang pernah ternah terjadi di Indonesia, hal tersebut didukung oleh tangguhannya pimpinan ulama Aceh (Amal, 2025).

Sebagai akibat dari Tractat Soematera maka perang tidak dapat dihindari antara Belanda dengan masyarakat Aceh. Perang Aceh dikenal pula dengan Perang Sabil karena masyarakat Aceh yang beragama islam melawan tenatara Belanda yang beragama Non-Muslim, didalam islam dikenal pula dengan jihad dan banyak pemimpin perlawanan Aceh berasal dari kalangan ulama (Amal, 2025). Pada saat jalannya perang, Pasukan Belanda menggunakan beberapa strategi seragan cepat namun strategi tersebut gagal. Sebagai akibat dari gagalnya strategi tersebut belanda kemudian melakukan blockade jalur laut, upaya diplomasi, upaya rekonsiliasi dan Belanda konsentgrasi dalam barisan benteng, setelah adanya upaya tersebut Belanda kemudian melakukan upaya penahanan pasif terhadap semua penduduk Aceh. Dari semua upaya yang telah dilakukan oleh pihak Belanda sama sekali tidak ada yang membuahkan hasil. Dari operasi yang dilakukan Belanda, pihaknya mengalami kerugian 15 hingga 20 juta gulden pertahun. Dari kerugian tersebut membuat pemerintah Belanda bangkrut (Anwar, 2021).

Pada tahun 1873 pemerintah Hindia Belanda mengumumkan pernyataan perang terhadap kerajaan Aceh. Perang yang dilancarkan oleh pihak pemerintah Hindia Belanda terhadap kerajaan Aceh dianggap berbahaya karena dapat merusak tatanan kehidupan sosial, ekonomi, politik dan keagamaan masyarakat Aceh. Agresi yang dilakukan oleh pihak Belanda dihadapi oleh pihak Kerajaan Aceh dengan manifestasi kolektif melalui bentuk perlawanan bersenjata yang merupakan perang terlama sepanjang sejarah.

Kondisi sosial dan budaya mengalami ketegangan yang ditimbulkan karena agresi yang dilakukan oleh Belanda. Disamping itu, Hikayat Perang Sabil memegang peranan yang sangat penting dalam Perang Aceh. Mobilisasi massa dilakukan oleh pemimpin-pemimpin agama untuk melawan musuh dan memainkan peranan yang sangat penting (Jannah, R., & Firdaus, 2025). Selain itu, faktor penentu yang paling efektif adalah tekanan angkatan perang Belanda itu sendiri. Dalam masyarakat yang nilai agamanya sangat menonjol seperti masyarakat Aceh, perang yang dilancarkan oleh kekuatan asing menimbulkan ketegangan dalam masyarakat (Muhajir, 2018). selain itu, agresi yang dilakukan oleh Belanda dianggap sebagai hal yang berbahaya karena dapat merusak nilai-nilai di dalam masyarakat (Alfian, 2016).

Perang Aceh yang berlangsung selama puluhan tahun memperkuat tradisi penentangan yang sangat keras terhadap kolonialisme barat. Perang Aceh atau perang Belanda di Aceh merupakan perang yang terjadi karena masyarakat Aceh menganggap bahwa Bangsa Belanda merupakan golongan Kafir "*Kaphe*" yang harus diperangi. Tradisi penentangan yang dilakukan

oleh masyarakat Aceh dianggap sebagai “*Kaphe*” telah menyebabkan berkembangnya suatu sikap politik masyarakat Aceh, disisi lain juga mempengaruhi corak serta perkembangan sosial di Aceh (Alfian, 2016).

Perang di Jalan Allah atau Perang Aceh 1873-1912 menarik untuk dibahas karena perang ini melibatkan seluruh elemen masyarakat, dan memberikan dampak yang sangat signifikan bagi kehidupan sosial masyarakat Aceh. Sepanjang perang yang berlangsung selama 40 tahun, seluruh masyarakat Aceh turut terlibat dibawah pimpinan para ulama.. Perang Aceh melibatkan rakyat dan wilayah yang terjadi sepanjang Perang Aceh. Salah satu ketertarikan penulis dalam menulis perang Aceh dengan konteks kehidupan sosial.

Penelitian ini menawarkan kebaruan konseptual dan analitis dalam kajian sejarah sosial-keagamaan mengenai Perang Aceh (1873–1912). Selama ini, berbagai penelitian cenderung menitikberatkan pada aspek politik, militer, atau hubungan kolonial antara Kesultanan Aceh dan Pemerintah Hindia Belanda. Berbeda dengan itu, penelitian ini mengarahkan fokus pada dimensi sosial, ideologis, dan keagamaan masyarakat Aceh, dengan menempatkan Perang Aceh sebagai bentuk manifestasi kesadaran kolektif berbasis nilai-nilai Islam, bukan sekadar sebagai konflik bersenjata.

Kebaruan utama penelitian ini terletak pada upaya untuk mengaitkan pengkhianatan terhadap Traktat London 1857 dan Perjanjian Sumatera 1871 dengan proses lahirnya ideologi perang sabil (*jihad fi sabilillah*) sebagai landasan moral perjuangan rakyat Aceh. Dalam konteks ini, agresi Belanda tidak hanya dipandang sebagai ekspansi kolonial semata, tetapi juga sebagai tantangan terhadap sistem nilai, kedaulatan spiritual, dan identitas sosial masyarakat Aceh yang berlandaskan pada ajaran Islam.

Selain itu, penelitian ini menghadirkan kontribusi baru melalui redefinisi peran ulama bukan hanya sebagai pemimpin keagamaan, melainkan sebagai aktor sosial, kultural, dan ideologis yang mampu menggerakkan kesadaran kolektif masyarakat Aceh. Melalui medium sastra religius seperti Hikayat Perang Sabil, ulama berperan dalam membangun semangat jihad, solidaritas sosial, serta legitimasi moral terhadap perlawanan terhadap kolonialisme.

Dari segi metodologi, penelitian ini memadukan metode sejarah kritis yang meliputi tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi dengan pendekatan sosiologis-historis. Integrasi ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap dinamika sosial dan keagamaan yang melatarbelakangi ketahanan masyarakat Aceh selama konflik berlangsung. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada reinterpretasi Perang Aceh sebagai fenomena sosial-keagamaan yang kompleks, di mana jihad, nilai-nilai Islam, dan struktur sosial masyarakat Aceh menjadi kekuatan utama dalam menghadapi imperialisme Barat. Pendekatan ini tidak hanya memperluas horizon kajian sejarah kolonial Indonesia, tetapi juga memperkaya diskursus akademik tentang peran agama dan budaya lokal dalam membentuk gerakan perlawanan terhadap kolonialisme.

METODE PENELITIAN

Dalam metodologi sejarah, seorang sejarawan dituntut untuk menguasai metode yang digunakan untuk mengetahui peristiwa masa lampau. Untuk itu dilakukanlah penelitian berupa prosedur penyelidikan dengan menggunakan tehnik pengumpulan data sejarah, berupa buku dan karya tulis ilmiah. Mempelajari metodologi sejarah berarti menguraikan metode penelitian sejarah, sumber sejarah dan penulisan sejarah (Sulasman., 2014). Dalam kedudukannya sebagai ilmu, sejarah terikat pada prosedur-prosedur penelitian ilmiah, juga terikat pada penalaran dan bersandar pada fakta. Kebenaran sejarah itu sendiri terletak pada kesediaan sejarawan untuk meneliti sumber sejarah secara tuntas dan objektif (Kuntowijoyo, 1995).

Metode penelitian ini merujuk pada pandangan Nugroho Notosusanto yang mengungkapkan pada langkah-langkah penulisan sejarah melalui empat langkah yang tercantum dibawah ini:

1. Heuristik, berupa kegiatan mengumpulkan jejak-jejak masa lampau
2. Kritik Sumber, yaitu kegiatan menyelidiki keaslian bentuk maupun isi jejak-jejak yang ditinggalkan, sehingga merupakan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
3. Interpretasi, yaitu menetapkan makna yang saling berhubungan dengan fakta-fakta sejarah yang telah diperoleh setelah kritik intern dan ekstern.
4. Historiografi, penyampaian sintesa dalam bentuk karya Sejarah (Notosusanto, 1971).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjanjian Sumatera pada tahun 1871 telah dihianati oleh pihak Belanda, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pengibaran bendera perang Belanda terhadap Kerajaan Aceh (Fitriyah, 2019). Perang yang dilancarkan oleh pihak Belanda menimbulkan ketegangan sosial dan dijawab dengan perang pula oleh rakyat Aceh. Pada agresi pertama bulan April 1873 dan agresi kedua pada Desember 1873, pasukan-pasukan Aceh berusaha sedapat mungkin bersusun dekat bersama-sama dalam menghadapi serangan Belanda. Pertempuran berlangsung di lapangan terbuka di daerah pantai atau sekitar kampung-kampung. Dalam pertempuran tersebut, tentara Belanda mempunyai organisasi dantentara yang terlatih baik. Kedua pihak melakukan apa yang disebut dengan perang besar (Munir, 2019).

Setelah Belanda melakukan agresi terhadap Aceh dan mendapat penolakan dari masyarakat Aceh, kondisi sosial ekonomi masyarakat berubah setelah kehadiran Belanda di Aceh mendapat perlawanan dari masyarakat Aceh, sehingga kondisi sosial ekonomi tidak berjalan seperti sebelumnya (Indriyeti Pratiwi, 2007). Perang Aceh mengakibatkan masyarakat Aceh kehilangan pekerjaan, pendidikan terhambat dan sektor kehidupan lain menjadi terganggu sehingga kondisi sosial ekonomi tidak dapat berjalan seperti sebelumnya. Perang Aceh yang berlangsung selama 40 tahun dilakukan dengan pertumpahan darah, ketegangan sosial, pergolakan rakyat, kekacauan sosial yang berkepanjangan (Muhajir, 2018). Motivasi untuk melakukan perang suci berakar dihati masyarakat Aceh , keberanian pejuang terlihat dari kemampuan ketika terjadi penghadangan dan peperangan yang terjadi secara terbuka dengan kemampuan memainkan senjata, seperti: rencong, pedang, bendil dalam arena berperangan. Setiap orang wajib berperang sabil baik kaum laki-laki, perempuan, tua, muda, kaya, miskin, rakyat, raja, alim fasik, hina dan mulia.

Pada saat perang Aceh berlangsung masyarakat Aceh terjadi pergolakan di dalam lapisan masyarakat, dengan adanya wabah penyakit kolera yang merebah dan masyarakat yang ikut serta dalam peperangan terjangkit dan banyak korban yang berjatuha mengakibatkan tentara pasukan aceh melemah. Pada saat yang bersamaan *dalam* (Keraton) berhasil dikuasai oleh Belanda. Setelah *dalam* (Keraton) pada tahun 1874 menghentikan agresinya dengan tujuan harapannya dapat tercapai persetujuan seperti Traktat Siak dengan Sultan Aceh. Setelah Sultan Mahmud Syah mangkat akibat penyakit kolera, perlawanan rakyat Aceh tetap berlanjut dibawah pimpinan oleh pemimpin Aceh.

Sementara itu, struktur pemerintahan kesultanan Aceh tradisonal tidak membaur, apalagi setelah wafatnya Sultan Mahmud Syah dan jatuhnya *dalam* (Keraton) dikarenakan simbol dari pusat kekuasaan telah hilang. Hal tersebut menyebabkan keberagaman sikap dan perbuatan dari

negeri-negeri yang dipimpin oleh *uleebalang* dalam menghadapi krisis yang ditimbulkan oleh agresi. Disamping itu, negeri-negeri yang turut melawan Belanda terdapat pula yang mengangkat bendera Belanda dengan tujuan agar ekspor dan impor berjalan dengan lancar tanpa adanya gangguan. Tetapi, terdapat pula negeri-negeri yang belakangan ini menggunakan setiap kesempatan untuk membantu pembekalan pihak muslimin secara diam-diam (Alfian, 2016).

Ajaran Islam telah mendarah daging dan menjadi peraturan hidup bagi masyarakat Aceh, sehingga Islam menjadi *way of life* masyarakat Aceh. Kondisi agama di Aceh bertahan sampai dengan Belanda menyatakan perang dan menyerang Kerajaan Aceh pada April 1873. Kemudian kondisi keagamaan di Aceh mengalami proses yang dinamis. Pada saat perang melawan Belanda sentimen agama memainkan peran yang sangat penting. Pada saat itu, Sultan tidak sanggup untuk memimpin jalannya perang, dan para *uleebalang* tidak mampu menyatukan massa. Kemudian, Ulama dari Cot Dayah muncul untuk melaksanakan perang jihad. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ulama menjadi salah satu bagian yang penting dalam perang di Aceh. Ulama menyebarkan ideologi perang sabil (Amal, 2025).

Menurut masyarakat Aceh, nilai agama menduduki posisi paling tinggi dan kedudukannya setara dengan politik sehingga keduanya dapat dilakukan secara bersamaan. Kehidupan masyarakat Aceh senantiasa diilhami dan diwarnai oleh unsur-unsur yang berbau Islami. Hal tersebut disebabkan, karena masyarakat Aceh telah hidup dengan ajaran Islam selama berabad-abad. Bahkan dalam kondisi perang tetapkan bernafaskan Islam yang kemudian menjadi pendorong dan motivasi bagi masyarakat Aceh bersama para ulama dan pemimpin agama untuk berperang melawan kafir (Belanda) (Alfian, 2016).

Pada saat peperangan melawan Belanda, masyarakat Aceh yakin bahwa hanya Islam satu-satunya kebenaran yang tidak bisa ditawar. Sebagai akibatnya masyarakat mantap untuk menghadapi Belanda dengan perlawanan fisik. Atas dasar keyakinan tersebut maka masyarakat Aceh menyadari sepenuhnya hak-hak dasarnya sebagai manusia yang sama disisi Allah SWT (Thamrin, 2003).

Perang melawan Belanda, bangsa asing dan Kaum Kafir "*Kaphe*" yang diyakini oleh umat Islam di Aceh sebagai perang suci/jihad (Hardiansyah, 2010). Unsur jihad dalam perang sabil digunakan oleh masyarakat Aceh sebagai ideologi hukum dalam peperangan untuk berperang melawan *Kaphe* (kafir) (García, 2013). Menurut masyarakat Aceh Jihad merupakan sesuatu kewajiban yang diperintahkan oleh agama. Dengan demikian, seruan untuk melakukan jihad tersebar sampai dipelosok tanah Aceh yang saat itu tidak ada pejuang dan ulama yang mengetahui seruan berjihad melawan Belanda. Pada saat perang Aceh ulama muncul sebagai figur agama yang sanggup untuk memimpin dan mengarahkan para pejuang untuk mengusir Belanda dari tanah Aceh dengan simbol agama seperti Hikayat Perang Sabil, para ulama Aceh membakar semangat rakyat untuk siap melawan penjajah yang dianggap sebagai kafir (Siahaan, S., Hendra, A., & Midhio, 2021).

Ulama sebagai pemimpin agama memimpin rakyat Aceh untuk terus berjuang dengan seruan-seruan perang jihad dan mengobarkan semangat jiwa perang sabil. Dorongan perang yang digerakkan ini menjadikan masyarakat Aceh termotivasi, bersemangat bahkan berkorban samapai titik darah penghabisan untuk terus berjuang melawan Belanda dari Aceh. Hal tersebut menyebabkan Belanda dan pihak Aceh menghabiskan biaya dan korban jiwa yang tidak sedikit (Indriyati Pratiwi, 2007).

Setelah dalam (Keraton) jatuh ke tangan Belanda, 31 *uleebalang* menandatangani perjanjian dengan Belanda. Isi perjanjian tersebut berisi enam pasal yang berbunyi: 1) mengakui raja Belanda sebagai raja yang dipertuan dengan sah dan sebagai tandanya tidak akan mengangkat bendera lain, baik di darat maupun di laut selain dari pada bendera Belanda. 2)

memerintah dengan adil, menjaga ketertiban, keamanan dalam negerinya bersama tetangga-tetangganya, memajukan kemakmuran rakyat dan melindungi perdagangan, kerajinan tangan, pertanian dan pelayaran. 3) dengan segala kekuatan menentang perdagangan budak dan mengawasi perampokan dan penculikan manusia. 4) memberikan bantuan kepada orang yang mengalami kerusakan kapal dan menyimpan barang-barang yang sampai ke pantai, dan tidak membiarkan jika rakyat tidak menaatinya. 5) tidak memberi tempat persembunyin kepada kawula pemerintah Hindia Belanda yang bersalah dan melakukan pelanggaran. 6) tidak akan melakukan hubungan ketatanegaraan dengan negara-negara asing.

Meskipun adanya perjanjian takluk yang telah disepakati oleh pihak Belanda dan *uleebalang* tentara perang Aceh terus melakukan serangan kepada pihak Belanda. Pihak Aceh mampu menembus benteng pertahanan Belanda namun pihak Belanda tidak mampu menembus benteng pertahanan Aceh. Pihak Aceh menggunakan kesempatan untuk meneruskan perlawanan dengan bekal alata-alat perang pejuang-pejuang Aceh yang disalurkan dari Pidie melalui jalur Pantai ke Mukim XII.

Berlangsungnya perang Aceh tidak dapat dipisahkan dari Hikayat Perang Sabil yang memegang peranan yang sangat strategis. Dalam masyarakat yang nilai agamanya sangat menonjol seperti masyarakat Aceh, perang yang dilancarkan oleh kekuatan asing menimbulkan ketegangan dalam masyarakat dan ditafsirkan sebagai bahaya yang merusak nilai-nilai masyarakat yang mengakibatkan lahirnya interpretasi situasional berdasarkan nilai agama. Bagaimana keadaan sosio-kultural masyarakat Aceh yang melahirkan interpretasi seperti tersebut di atas tercermin dalam peribahasanya yang berbunyi "*Hukom ngon adat han jeuet cre, logée dat ngon sifeuet*" yang artinya, hukum agama tidak dapat dipisahkan dari adat, seperti tidak dapat dipisahkannya antara zat Tuhan dengan sifat-Nya.

Ketegangan antara Belanda dan Aceh tersebut kemudian dijelaskan oleh Tuanku Hasyim dan para pemimpin sagi di Aceh Besar, kepada pemimpin-pemimpin Aceh yang lain. Dalam suratnya tertanggal 18 April 1874 dijelaskan bahwa seluruh masyarakat Aceh tidak boleh takut melawan Belanda karena sesungguhnya Allah SWT bersama penduduk Aceh. Senada dengan surat tersebut, Tgk. Muhammad Amin Dayah Cut Tiro menyerukan agar barang siapa yang yakin akan Allah dan Rasul-Nya hendaklah berperang sabil ke Aceh Besar. Rakyat dianjurkan untuk berpuasa tiga hari, membaca Qur'an, mengadakan kenduri dan memberi sedekah untuk menolak bala serta bertobat jika telah melanggar syari'at Islam (Jannah, R., & Firdaus, 2025).

Dari pemaparan diatas, maka tampaklah adanya usaha untuk mempersiapkan orang Aceh agar melakukan aksi kolektif berdasarkan keyakinan agama dan ditopang dengan dasar moral yang tinggi. Usaha serupa juga dilakukan oleh sekelompok cendekiawan yang mahir dalam sastra. Sebagian dari mereka membawa ideologi perang sabil dalam bentuk pantun dan hikayat untuk menghibur masyarakat. Salah seorang yang termasuk dalam kelompok ini adalah Dokarim yang berasal dari Keutapang Dua, Mukim VI, Sagi Mukim XXV. Salah satu hasil karyanya adalah *Hikayat Prang Compeuni* yang berisikan tindakan-tindakan kepahlawanan Aceh dalam melawan Belanda. Dari kalangan pemimpin agama sendiri ada Tgk. Nyak Ahmad dari Pidie yang juga menulis karya sastra yang dapat digolongkan sebagai Hikayat Perang Sabil. Dalam karyanya Tgk. Nyak Ahmad menyebutkan bahwa memerangi orang kafir (Belanda) merupakan salah satu bentuk perang di jalan Allah SWT (*Sabilillah*) dengan balasan surga (Ali, 2017).

Syaikh Ibrahim Lam Bhuek bin Syaikh Marhaban, yang menjadi pejabat *uleebalang* Mesjid Raya, menyatakan, bahwa pikiran berperang sabil melawan kafir ini sudah ada sejak Portugis menyerang Aceh. Dalam *Hikayat Malem Dagang* yang ditulis pada abad XVII M dikisahkan bagaimana perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis. Kisah melawan kafir seperti tercermin di dalam *Hikayat Malem Dagang* ini rupanya terus diwariskan kepada generasi

berikutnya agar orang Aceh dapat menarik pelajaran dari kisah tersebut.

Pada masa perang Belanda *Hikayat Prang Sabil* dibaca di *dayah-dayah, meunasah-meunasah*, di rumah-rumah ataupun di tempat lainnya sebelum orang pergi berperang. Untuk menyebarkan isinya, naskah *Hikayat Perang Sabil* disalin berkali-kali dan diusahakan tersebar ke berbagai pelosok Tanah Aceh. Beberapa kisah dimasukkan dalam satu naskah seperti kisah Abdul Wahid dan kisah Sa'id Salmi yang berisi anjuran berperang sabil. Di wilayah Pasai, Aceh Utara, terdapat pula sebuah hikayat yang dinamakan Hikayat Prang Geudong. Hikayat ini memuji T. Raja Hitam, raja Geudong, yang menjual hartanya untuk membeli senapan dan senjata tajam guna memerangi kafir. Sumber gubahan *Hikayat Perang Sabil* ini biasanya diambil dari kitab *Mukhtasar Muthiri'lgharam* dan karangan Syaikh Abdussamad dari Palembang berjudul *Nasihatu 'l-muslimi*.

KESIMPULAN

Perang Aceh (1873–1912) merupakan salah satu konflik terpanjang dan paling berdampak dalam sejarah kolonial Indonesia. Perang ini berawal dari pengkhianatan Belanda terhadap Perjanjian Sumatera 1871, yang dianggap sebagai bentuk permusuhan terbuka terhadap Kerajaan Aceh. Tindakan agresi tersebut memicu perlawanan rakyat Aceh secara menyeluruh, bukan hanya sebagai bentuk pertahanan politik dan teritorial, tetapi juga sebagai perang suci (*jihad fi sabilillah*) yang berlandaskan keyakinan agama Islam.

Dalam menghadapi kolonialisme, masyarakat Aceh menunjukkan solidaritas sosial dan keberanian luar biasa. Perang ini tidak hanya berlangsung di medan tempur, tetapi juga dalam dimensi sosial, budaya, dan spiritual. Islam menjadi sumber motivasi utama perjuangan; para ulama berperan penting sebagai pemimpin moral, ideolog, dan penggerak rakyat melalui seruan jihad serta karya sastra seperti *Hikayat Perang Sabil* yang membakar semangat perlawanan.

Namun, dampak perang ini sangat besar terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat Aceh. Perang panjang menimbulkan kehancuran ekonomi, menurunnya kesejahteraan, terhambatnya pendidikan, merebaknya penyakit, serta melemahnya struktur pemerintahan tradisional. Setelah jatuhnya Keraton pada 1874 dan wafatnya Sultan Mahmud Syah, masyarakat Aceh mengalami disintegrasi sosial, namun semangat perlawanan tetap hidup di bawah pimpinan ulama dan tokoh-tokoh lokal.

Perang Aceh membuktikan bahwa agama dan politik dalam masyarakat Aceh tidak dapat dipisahkan. Islam telah menjadi identitas kolektif, sumber kekuatan, dan pedoman hidup masyarakat. Nilai-nilai jihad, kehormatan, dan keteguhan iman menjelma menjadi kekuatan sosial yang meneguhkan perjuangan rakyat melawan penjajahan. Dengan demikian, Perang Aceh tidak hanya dimaknai sebagai konflik bersenjata, tetapi juga sebagai manifestasi kesadaran keagamaan dan sosial masyarakat Aceh dalam mempertahankan martabat, keyakinan, dan kemerdekaan mereka dari kekuasaan asing.

DAFTAR REFERENSI

- Alfian, I. (2016). *Perang di Jalan Allah: Perang Aceh 1873-1912*. Ombak.
- Amal, R. (2025). The communication strategy of ulama in propagating the tale of the sabil war against the Dutch in 1902–1912. *Malikussaleh Social and Political Reviews*, 6(1), 53–57. <https://doi.org/https://doi.org/10.29103/mspr.v6i1.19309>
- Anwar. (2021). Strategi Kolonial Belanda Dalam Menaklukkan Kerajaan Aceh Darussalam. *Jurnal Adabiya*, 19(1), 13., 100. <https://doi.org/doi:https://doi.org/10.22373/adabiya.v19i1.7482>

- Fitriyah, L. (2019). " *PERANG ACEH 1873-1903 (SURUTNYA HUBUNGAN DIPLOMASI KESULTANAN ACEH DAN TURKI UTSMANI) "*. 1903.
- García, R. (2013). Heroisme Perlawanan Kolonial Dalam Film Cut Nyak Dhien. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Indriyetti Pratiwi. (2007). *Peran Ulama dalam Perang Aceh*.
- Jannah, R., & Firdaus, T. (2025). Sastra agama dalam Hikayat Perang Sabi: Sebuah ideologi masyarakat Aceh melawan penjajahan Belanda. *Acintya : Jurnal Teologi, Filsafat dan Studi Agama*, 1(1), 54–74. <https://e-journal.samsarainstitute.com/jtfsa/article/download/14/15>
- Kuntowijoyo. (1995). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yayasan Bentang Budaya.
- Kurnia, R. R., Saputro, G. E., & Prakoso, L. Y. (2023). War strategy of Acehnese and Dutch in the Aceh War 1873–1912. *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 7(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30829/juspi.v7i1.14847>
- Muhajir, A. (2018). *Langkah Politik Belanda di Aceh Timur: Memahami Sisi Lain Sejarah Perang Aceh, 1873-1912*. <https://doi.org/https://doi.org/10.30743/mkd.v1i2.515> 1(2), , 160–171
- Munir, M. M. (2019). KETERLIBATAN SNOUCK HURGRONJE DALAM MENAKLUKKAN ACEH TAHUN 1899-1906 M. In *Thesis*.
- Notosusanto, N. (1971). *Norma-norma Dasar Penelitian dan Penulisan Sejarah*. Dephankam.
- Siahaan, S., Hendra, A., & Midhio, I. (2021). STRATEGI PERANG SEMESTA DALAM PERANG ACEH (1873-1912). *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(11), 2537-2548. <https://doi.org/https://doi.org/10.47492/jip.v1i11.517>
- Sulasman. (2014). *Metodologi Penelitian Sejarah*. Pustaka Setia.
- Thamrin, D. (2003). *Aceh Melawan Belanda*. CV. Wahana.